

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI *ELECTRONIC* MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (*E-MUSRENBANG*) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG**

**DEVI DAMAYANTI<sup>1</sup>, MAS HALIMAH<sup>2</sup>, BUDIMAN RUSLI<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

<sup>2</sup>[mas.halimah@unpad.ac.id](mailto:mas.halimah@unpad.ac.id)

### **ABSTRACT**

Bandung municipality Government is getting more serious in developing governance and public service delivery through ICTs platform. Urban participatory planning through online application platforms (e-participatory planning, it called e-Musrenbang in Bandung Municipality) has become a very important element to involve citizens and Bandung municipality government to address complex problems of urban issue, public services, and urban affairs. In fact, the implementation of the e-Musrenbang policy faces many obstacles in the Cibiru Sub-district. Actually, the bureaucratic structure of the implementation of e-Musrenbang in Cibiru District shows a positive impact where the process is more effective, efficient, transparent, and accountable. However, in implementing it policy, obstacles are still found relating to aspects of communication, resources, and the attitude of the implementer. This research found that while cooperation between Development Planning, Research, and Development Agency or Bappelitbang (Bandung Municipality Government), IAITB Jabar (Academics), Relawan e-Musrenbang (Civil Society), and Telkomsel (Business), were able to reduce the costs but it still becomes a challenge on how Bappelitbang of Bandung Municipality reduces digital divide for e-Musrenbang users.

**Keywords:** *e-Musrenbang; Implementation; Policy; Urban Participatory Planning.*

### **IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC APPLICATION POLICY - DEVELOPMENT PLANNING CONSULTATION (*E-MUSRENBANG*) IN CIBIRU DISTRICT, BANDUNG CITY**

### **ABSTRAK**

Pemerintah Kota Bandung semakin serius dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep *Smart City*. Perencanaan Pembangunan Kota berbasis teknologi informasi komunikasi atau aplikasi online menjadi elemen sangat penting dalam melibatkan masyarakat dan pemerintah Kota Bandung untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan urusan perkotaan, layanan publik perkotaan dan tata kelola pemerintahan kota.. Secara struktur birokrasi pelaksanaan e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru menunjukkan dampak positif dimana prosesnya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih mengalami hambatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana. Penelitian menemukan bahwa meskipun kerjasama antara Bappelitbang Kota Bandung (Pemerintahan), IAITB Jabar (Akademisi), Relawan e-Musrenbang (Civil Society), dan Telkomsel (Bisnis), mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan suatu rencana program, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai permasalahan mengenai bagaimana Bappelitbang kota Bandung menurunkan digital divide diantara para user e-Musrenbang.

**Kata kunci:** *e-Musrenbang; Implementasi; Kebijakan; Perencanaan Pembangunan Partisipatif.*

## PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam tatakelola pemerintahan daerah memiliki peran yang penting untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada paradigma Administrasi Publik, yaitu *New Public Service* (NPS) juga dijelaskan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merumuskan program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan supaya hak-hak warganegara dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan serta pelayanan publik dijamin dan dilindungi.

Dengan banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat saat ini mendorong pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya memberikan pelayanan publik yang merata tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum dengan mengedepankan kualitas pelayanan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya dengan menerapkan dan mengembangkan pelayanan berbasis elektronik yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah daerah telah mendorong dan mengembangkan inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan *electronic musrenbang* (e-musrenbang). *E-musrenbang* adalah sistem perencanaan pembangunan nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang biasanya dapat diakses di website [musrenbang.bandung.go.id](http://musrenbang.bandung.go.id).

Munculnya e-musrenbang juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai teknologi inovasi dalam mengatasi permasalahan perkotaan terutama mengenai tatakelola pemerintahan. Salahsatu pemerintah kota yang telah melaksanakan e-Musrenbang sampai dengan tingkat RW adalah kota Bandung. Bahkan Kota Bandung memiliki keunggulan sebagai pelaksana e-Musrenbang karena menjadi Kota yang dikategorikan sebagai smart city (lihat Akbar dan Sutrisno, 2017; Sodikin dan Kusumaputra, 2015).

Smart city dinilai memiliki pendekatan tatakelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada peran sosial capital (misalnya pendidikan), dan hubungan-hubungan antara citizen, pemerintah serta swasta dalam pembangunan perkotaan (Chourabi dkk., 2012; Lee dkk., 2014; Purao dkk., 2013; Schaffers dkk., 2011) khususnya perencanaan pembangunan berbasis elektronik atau e-Musrenbang yang lebih partisipatif di Kota Bandung. E-Musrenbang juga menjadi salahsatu kebijakan publik untuk membantu berjalannya proses musrenbang di daerah dan mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih terkontrol, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Metode ini dipilih karena tujuan dari penelitian untuk menjelaskan implementasi kebijakan aplikasi *electronic* musyawarah perencanaan pembangunan (e-musrenbang) Kecamatan Cibiru Kota Bandung serta mengetahui secara mendalam mengenai alasan implementasi kebijakan aplikasi *electronic* musyawarah perencanaan pembangunan (e-musrenbang) Kecamatan Cibiru Kota Bandung masih rendah yang dilihat dari pemenuhan elemen-elemen implementasi kebijakan. Adapun data penelitian dan hasil penelitian yang didapat penulis diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara, dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980), penulis melihat bahwa secara struktur birokrasi pelaksanaan e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru menunjukkan dampak positif dimana prosesnya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, apabila melihat aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana masih mengalami hambatan dan belum sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam praktiknya. Penulis pun menemukan bahwa user e-Musrenbang, yaitu ketua RW berada pada usia diatas 45 tahun dan memiliki keterbatasan literasi komputer atau aplikasi online. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian penulis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Aplikasi *Electronic* Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung", penulis menyajikannya dalam uraian berikut:

### 1. Aspek Komunikasi

Berdasarkan Informasi yang disampaikan oleh para informan, bahwa cara komunikasi yang dilakukan oleh Bappelitbang Kota Bandung dalam mengupayakan keberhasilan pelaksanaan e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru masih belum maksimal, karena penggunaan metode komunikasi yang dilakukan pada tahun 2017 dengan cara mengundang seluruh stakeholders dalam kegiatan launching dan sosialisasi e-Musrenbang, sosialisasi e-Musrenbang yang dilakukan satu tahun sekali di tingkat kecamatan dan pembagian buku panduan penggunaan aplikasi e-Musrenbang masih belum mampu meningkatkan *knowledge*, *skills*, dan literasi komputer, dan pemahaman para user, khususnya Ketua RW dalam menggunakan aplikasi e-Musrenbang. Kondisi tersebut semakin menunjukkan kurang baiknya metode, konten dan konteks dalam strategi komunikasi yang digunakan oleh Bappelitbang Kota Bandung. Kegagalan untuk mengkomunikasikan visi dan tujuan strategis kepada para pemangku kepentingan dapat berarti bahwa pengembang strategi tidak mendapatkan informasi yang cukup kepada para *stakeholder* untuk memahami apa yang seharusnya mereka lakukan (Davies dkk., 2010). Inisiatif atau tujuan baru diuraikan tetapi tidak dikomunikasikan tentang bagaimana tujuan baru harus terlihat dan dirasakan, langkah apa yang harus diambil, kerangka waktu, dll (Jenipher & Daniel, 2014). Kondisi ini menunjukkan adanya komunikasi yang kurang bagus diantara *stakeholder* yang bertanggung jawab untuk keputusan dalam implementasi aplikasi e-Musrenbang.

Meskipun begitu, ada strategi komunikasi bagus dan menarik yang digunakan oleh Bappelitbang Kota Bandung dalam mengedukasi, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan e-Musrenbang kepada para user se-Kota Bandung, yaitu melibatkan para pemuda yang memiliki literasi komputer baik dan mumpuni untuk menjadi *volunteer* yang dipanggil sebagai 'Relawan e-Musrenbang' yang dinaungi oleh Diskominfo Kota Bandung.

Pelibatan para relawan e-Musrenbang ini diharapkan dapat membantu Bappelitbang Kota Bandung untuk mendorong pemahaman dan penggunaan secara teknis e-Musrenbang di Kota Bandung langsung kepada para user. Selain itu, para relawan e-Musrenbang juga membantu ketua RW dalam menginput hasil usulan-usulan dari rembuk RW. Hal ini dilakukan karena dilapangan banyak ketua RW yang memiliki kemampuan literasi komputer rendah dan fasilitas ataupun alat untuk mengakses aplikasi yang masih belum mendukung. Sayangnya, dari hasil wawancara dengan Kasie Ekbang Kecamatan Cibiru dan Lurah Cipadung mengungkapkan bahwa tidak ada *volunteer* atau relawan e-Musrenbang yang membantu di kecamatan Cibiru. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan e-Musrenbang di tingkat RW dan LKK memang mengalami berbagai hambatan, karenanya

peran operator yang khusus menangani e-Musrenbang dari para ketua RW sangat memiliki peranan penting dalam membantu menginput data usulan melalui aplikasi tersebut.

Informasi yang didapatkan dari coordinator relawan e-Musrenbang Kota Bandung menjelaskan bahwa kondisi dimana ada kelurahan yang tidak ada relawan e-Musrenbang terjadi karena para relawan ini mundur ataupun berhenti sebagai volunteer yang cenderung dilatarbelakangi oleh jauhnya lokasi penempatan untuk membatu. Informan menambahkan bahwa hal tersebut tentunya tidak bisa dipaksakan, karena para relawan memang tidak dibayar ataupun mendapatkan upah sama sekali. Kegiatan tersebut hanya sukarela untuk membantu berkontribusi dalam pelaksanaan e-Musrenbang Kota Bandung. Sehingga tidak dapat memaksakan untuk terus berkontribusi. Meskipun begitu, informan dari Bappelitbang Kota Bandung mengakui bahwa kehadiran para relawan e-Musrenbang sangat membantu dalam implementasi e-Musrenbang pada tahun 2017 se-Kota Bandung.

## 2. Aspek Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program e-Musrenbang di Kota Bandung penulis melihat ada tiga sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama, yaitu SDM di Bappelitbang Kota Bandung, Relawan e-Musrenbang (*volunteer*), dan para user e-Musrenbang (Ketua RW dan LKK). Merujuk pada informasi dari Kasie Ekbang Kecamatan Cibiru, Lurah Cipadung, dan Koordinator Relawan e-Musrenbang, secara kuantitas ataupun jumlah sumberdaya manusia dari Bappelitbang Kota Bandung sangat terbatas dalam mengedukasi dan mensosialisasikan program kepada para user aplikasi e-Musrenbang, karenanya dilibatkan relawan e-Musrenbang dalam pelaksanaan awal program ini.

Secara Kualitas sumber daya manusia, ASN Bappelitbang Kota Bandung sudah baik dalam mendukung pelaksanaan program e-Musrenbang di Kota Bandung. Hal ini dapat terlihat dari jumlah aparatur sipil negara yang memiliki jenjang pendidikan D3 berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 38 orang, dan S2 berjumlah 42 orang (Bappelitbang, 2018). Namun, dalam praktiknya, ASN Bappelitbang mengalami kendala dalam mengkomunikasikan dan mempersiapkan kemampuan literasi komputer dan menurun tingkat *digital divided* para user aplikasi e-Musrenbang.

Informan yang menjabat sebagai Kasubid Data Informasi dan Pelaporan, Bappelitbang Kota Bandung, mengakui bahwa ketua RW cenderung didominasi oleh usia lanjut yang kurang memahami aplikasi (memiliki hambatan terkait literasi komputer). Informan juga mengungkapkan bahwa pergantian ketua RW yang sangat dinamis di lapangan menyebabkan *knowledge* dan kemampuan untuk menggunakan aplikasi e-Musrenbang dari user menjadi terbatas, sehingga harus mendapatkan bimbingan dan pelatihan kembali. Hal tersebut

cenderung menjadi hambatan dalam proses e-Musrenbang setiap tahunnya.

Para informan juga menjelaskan bahwa kurangnya SDM di Bappelitbang Kota Bandung menyebabkan sulitnya berkomunikasi atau berkonsultasi pada saat ada kendala dalam proses penginputan, misalnya *server down*, aplikasi tidak bisa diakses, ada usulan kegiatan yang tidak dapat diakomodir dalam aplikasi karena tidak tersedia sebagai pilihan kegiatan, dan kamus yang kurang dipahami oleh pihak ketua RW. Para user juga tidak mengetahui *contact center* atau media yang dapat dihubungi apabila ada kendala maupun keluhan pada saat proses pelaksanaan e-Musrenbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah aparatur Bappelitbang masih kurang dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan aplikasi e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Mengenai kualitas user aplikasi e-Musrenbang Kota Bandung, menurut lima informan yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa permasalahan literasi komputer, terutama ketua RW, tidak mampu untuk mengakses ataupun menggunakan aplikasi e-Musrenbang. Informan yang menjadi koordinator relawan e-Musrenbang juga menjelaskan bahwa, dalam praktiknya dilapangan, Ketua RW cenderung memiliki kemampuan literasi komputer yang rendah, *mobile phone* yang dimiliki oleh para ketua RW juga masih banyak yang belum berbasis android atau IOS. Hal ini menjadi hambatan pada saat pelaksanaan e-Musrenbang.

Keadaan ini tentunya harus menjadi perhatian bagi Bappelitbang Kota Bandung untuk meningkatkan kemampuan literasi para user aplikasi e-Musrenbang, karena tujuan pelaksanaan e-Musrenbang pada dasarnya untuk mempermudah perwakilan masyarakat (Ketua RW) untuk berpartisipasi aktif dan menyuarakan pendapatnya dalam perencanaan pembangunan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan kredibel. Meskipun mendapatkan bantuan dari tim relawan e-Musrenbang yang mendampingi ketua RW dalam mengakses dan menginput data ke aplikasi, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pegangan utama oleh Bappelitbang Kota Bandung karena para relawan cenderung mundur disaat jarak kostan atau tempat tinggal terlalu jauh dengan lokasi yang harus didampingi. Penulis juga melihat bahwa, relawan e-Musrenbang hanya bentuk pendekatan peningkatan literasi komputer yang sementara. Padahal berbagai peneliti menekankan bahwa semakin rendahnya 'kesenjangan digital (*digital divide*)' dapat menurunkan resiko dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berbasis aplikasi online (Compaine, 2001; Arrison, 2003). Maka dari itu, harus ada strategi lainnya yang harus dilakukan oleh Bappelitbang Kota Bandung dalam menurunkan digital divided para user aplikasi e-Musrenbang.

### 3. Aspek Sikap Pelaksana

Dalam penelitian ini, penulis melihat sikap pelaksana merupakan *support* dari tim implemendor e-Musrenbang, yaitu Bappelitbang Kota Bandung, Kecamatan Cibiru, dan Kelurahan se-Kecamatan Cibiru terhadap keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Merujuk pada hasil wawancara dengan tiga informan yang memiliki jabatan sebagai Kasie Ekbang Kecamatan Cibiru, Lurah Cipadung, dan Operator di Kelurahan Cipadung, penulis melihat bahwa sikap pelaksana dalam pelaksanaan program e-Musrenbang responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Koordinasi antara Kelurahan-Kecamatan dan Bappelitbang juga relatif terjalin cukup baik dalam mencari solusi pada saat ada hambatan baru yang muncul.

Merujuk pada informasi yang didapatkan dari Kasubid Data Informasi dan Pelaporan, Kasie Ekbang Kecamatan Cibiru, Lurah Cipadung, Operator Kelurahan Cipadung, dan Koordinator Relawan e-Musrenbang menunjukkan bahwa pelaksana program memiliki sikap yang responsif, dimana kasus permasalahan ketidakmampuan Ketua RW untuk mengakses aplikasi e-Musrenbang dan keterbatasan waktu yang disediakan oleh Bappelitbang Kota Bandung untuk menginput usulan kegiatan mendorong pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk mempekerjakan dua operator. Operator tersebut secara khusus membantu para Ketua RW yang mengalami hambatan pada saat kesulitan untuk menterjemahkan usulan kegiatannya kedalam aplikasi e-Musrenbang yang sudah dibentuk dalam kamus-kamus usulan kegiatan. Operator juga menjadi konsultan bagi para Ketua RW yang memiliki keterbatasan kemampuan literasi komputer maupun fasilitas pendukung untuk mengakses dan menggunakan aplikasi e-Musrenbang.

Disamping itu, Penulis menilai bahwa Kelurahan dan Kecamatan juga secara aktif mencoba membantu para Ketua RW yang merasa 'kaget' dengan metode baru dalam kegiatan musrenbang yang biasanya berbasis kertas menjadi aplikasi online dengan cara disediakannya operator khusus untuk membantu para Ketua RW untuk menginput usulan kerjanya Kelurahan dan Kecamatan di Cibiru membantu hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Ketua RW seperti ketidakpahaman menggunakan kamus dalam aplikasi e-Musrenbang serta tidak bisa diakomodirnya usulan kegiatan yang diajukan oleh ketua RW karena tidak tersedia dalam pilihan usulan kegiatan dan kamus dalam aplikasi dengan cara disediakannya operator dan dikumpulkannya Ketua RW di aula Kelurahan. Para Ketua RW yang benar-benar tidak mampu untuk menggunakan aplikasi e-Musrenbang akan dibantu untuk diinputkan usulan kegiatannya oleh para operator. Usulan yang tidak tersedia dalam pilihan aplikasi e-Musrenbang pun akan dibantu untuk *follow up* oleh Kecamatan dan Kelurahan kepada bappelitbang agar dibantu untuk

diakomodir usulan kegiatan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya sikap pelaksana yang responsif, tetapi komitmen mereka dalam menyukseskan program aplikasi e-Musrenbang di Kecamatan Bandung cenderung baik.

#### 4. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan yang penting juga dalam implementasi program. Edwards III mekarakteristikan struktur birokrasi dalam dua bentuk, yaitu *standard operating prosecure* (SOP) dan fragmentasi. Dalam struktur birokrasi program e-Musrenbang di Kota Bandung, Ketua RW merupakan aktor yang menginput data usulan kegiatan melalui aplikasi e-Musrenbang. Kemudian Lurah, yang ditunjuk sebagai user juga memverifikasi usulan-usulan yang diajukan oleh seluruh Ketua RW di wilayahnya. Selanjutnya, Camat juga memverifikasi usulan-usulan yang diajukan oleh seluruh Kelurahan di wilayahnya. Tahap selanjutnya adalah usulan akan dilanjutkan ke SKPD terkait dimana usulan tersebut ditujukan dan akan dijadikan acuan rencana pembangunan Kota di tahun anggaran selanjutnya. Secara struktur birokrasi pelaksanaan e-Musrenbang mudah karena sudah berbasis aplikasi online. Sehingga sangat mudah di monitoring untuk setiap tahapannya sehingga estimasi waktu untuk pelaksanaan disetiap tahapan sangat jelas.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai inplementasi kebijakan aplikasi e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi Electronic Musyawarah Perencanaan Pembangunan belum efektif. Hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya aspek-aspek penting implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi yang belum berjalan dengan baik dan sumberdaya yang belum memadai.

Adapun saran yang penulis ajukan adalah membuat affirmative action policy dengan menggunakan data dari laporan operator maupun Kelurahan, dimana Ketua RW yang memiliki keterbatasan kemampuan literasi komputer dimasukkan dalam suatu program pelatihan yang diselenggarakan di Kelurahan satu bulan sebelum pelaksanaan e-Musrenbang. Penulis menyarankan dibuatnya program pelatihan literasi komputer, yaitu program yang dirancang untuk menumbuhkan kemampuan literasi komputer melalui pembelajaran dari para operator yang ada di Kelurahan. Pada program ini dikembangkan keterampilan dan pemahaman terkait penggunaan aplikasi e-Musrenbang, arah pembangunan Kota Bandung, konten aplikasi e-Musrenbang yang didukung dengan perlengkapan, serangkaian pelatihan dan keseriusan pimpinan pemerintahan dalam

membantu menurunkan digital divide di Kota Bandung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Creswell, John W. 2010. *Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Putri, Nindia Prisca. 2015. *Studi Eksplorasi tentang Variabel Pendukung Keberhasilan Aplikasi Sistem E-Musrenbang di Bappeko Surabaya*. Paper. Surabaya: Program Sarjana Universitas Airlangga
- Rachmadi, Lexy J. Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Rahmawaty, Widdya. 2015. *Implementasi Program Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) Pada Bidang Pendidikan di Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: Program Sarjana Universitas Padjadjaran
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing.
- Syahrir. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Informasi E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo*. Paper. Palopo. Universitas Cokroaminoto
- Sodikin and R.A. Kusumaputra, "These are the cities of smart city recipient", retrieved from <http://print.kompas.com/baca/ipitek/2015/08/13/Inilah-Kota-KotaPenerima-Anugerah-Kota-Cerdas-2015>, August 2015.
- [Musrenbang.bandung.go.id](http://Musrenbang.bandung.go.id)